



LAPORAN KEUANGAN UAKPA TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)

**662986
PENGADILAN NEGERI
SANGATTA**

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN KEUANGAN (Audited)

Untuk periode yang berakhir 31 DESEMBER 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, S.H No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit
Pelangi Sangatta – Kutai Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun Anggaran 2024 (Audited) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2024 (Audited) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II. Di samping itu, Laporan Keuangan (Audited) ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 5 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



Arini Widiastuti, S.IP.
NIP. 197409182006042001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	29
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	33
F. Pengungkapan Penting Lainnya	36
VI. Lampiran - lampiran	40



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

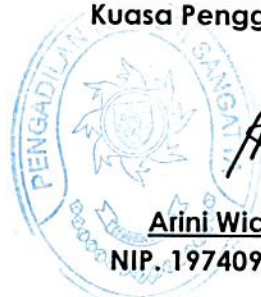
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2024 (Audited) yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dari posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 5 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,

Arini Widiastuti, S.IP.

NIP. 197409182006042001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2024 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp11,583,059** atau mencapai **178 persen** dari **estimasi pendapatan sebesar Rp6,522,000**.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp4,304,117,157** atau mencapai **99 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp4,343,017,000**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar **Rp7,710,828,285** yang terdiri dari : **Aset Lancar sebesar Rp. 3,095,000** **Aset Tetap (neto) sebesar Rp7,707,733,285** **Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp14,871,007** dan **Rp7,695,957,278**. Sehingga nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar **Rp7,710,828,285**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp10,884,700** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp4,528,019,435** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai

(4,517,134,735) Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 286 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (4,516,436,376).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp7,892,379,556 dikurangi Defisit-LO sebesar (4,516,436,376) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4,320,014,098. Penurunan ekuitas sebesar (196,422,278) sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp7,695,957,278.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2024 (Audited)

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)

EMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
SELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
ATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662986

URAIAN			2024				2023			
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1			2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
I. Pendapatan Perpajakan			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
1. Pajak Dalam Negeri			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Pajak Perdagangan Internasional			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak			6,522,000.	11,583,059.	5,061,059.	178	6,797,000.	8,736,400	1,939,400	128,53
1. Pendapatan Sumber Daya Alam			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
3. Pendapatan BLU			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya			6,522,000.	11,583,059.	5,061,059.	178	6,797,000.	8,736,400.	1,939,400	128,53
III. Pendapatan Hibah			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)			6,522,000.	11,583,059.	5,061,059.	178	6,797,000.	8,736,400	1,939,400	128,53
B. Belanja Negara			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
I. Belanja Pemerintah Pusat			4,343,017,000.	4,304,117,157.	(38,899,843.)	99	4,118,245,000.	4,099,507,993	(3,737,007)	99,55
1. Belanja Pegawai			3,075,804,000.	3,053,125,871.	(22,678,129.)	99	2,889,535,000.	2,875,430,157	(1,104,843)	99,51
2. Belanja Barang			1,217,213,000.	1,201,131,286.	(16,081,714.)	99	1,228,710,000.	1,224,077,836	(4,632,164)	99,62
3. Belanja Modal			50,000,000.	49,860,000.	(140,000.)	100	0.	0.	0.	0.
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
5. Belanja Subsidi			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
6. Belanja Hibah			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
7. Belanja Bantuan Sosial			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
8. Belanja Lain-lain			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2024 (Audited)**

1. Transfer ke Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
a. Dana Perimbangan	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
1. Dana Transfer Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
a. Dana Bagi Hasil	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
b. Dana Alokasi Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Dana Transfer Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
b. Dana Insentif Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
c. Dana Keistimewaan DIY	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
d. Dana Otonomi Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Dana Desa	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
3. Hibah Kepada Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,343,017,000.	4,304,117,157.	(38,899,843)	99	4,118,245,000	4,099,507,993	18,737,007	99,55.
C. PEMBIAYAAN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN : (005) MAHKAMAH AGUNG
NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NAMA PERKIRAAN			JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
			2024	2023	Jumlah	%
1			2	3	4	5
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Bendahara Pengeluaran			3,095,000.	0	3,095,000	0.00
Piutang Bukan Pajak			0.	0	0	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)			0.	0	0	0.00
JUMLAH ASET LANCAR			3,095,000.	0	3,095,000	0.00
ASET TETAP						
Tanah			3,279,400,000.	3,279,400,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin			3,025,549,419.	2,948,209,419	77,340,000	2.62
Gedung dan Bangunan			4,873,641,500.	4,873,641,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya			27,517,047.	27,517,047	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN			(3,498,374,681)	(3,230,720,306)	(267,654,375)	8.28
JUMLAH ASET TETAP			7,707,733,285.	7,898,047,660	(190,314,375)	(2.41)
ASET LAINNYA						
Aset Tak Berwujud			4,900,000.	4,900,000	0	0.00
Aset Lain-lain			49,531,000.	49,531,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA			(54,431,000.)	(54,431,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA			0.	0	0	
JUMLAH ASET			7,710,828,285.	7,898,047,660	(187,219,375)	(2.37)
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2024 (Audited)**

Utang kepada Pihak Ketiga	14,871,007.	5,668,104	9,202,903	162.36
Utang Yang Belum Ditagihkan	0.	0	0	0.00
Uang Muka dari KPPN	0.	0	0	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14,871,007.	5,668,104	9,202,903	162.36
JUMLAH KEWAJIBAN	14,871,007.	5,668,104	9,202,903	162.36
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,695,957,278.	7,892,379,556	(196,422,278)	(2.49)
JUMLAH EKUITAS	7,695,957,278.	7,892,379,556	(196,422,278)	(2.49)
JUMLAH EKUITAS	7,695,957,278.	7,892,379,556	(196,422,278)	(2.49)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,710,828,285	7,898,047,660	(187,219,375)	(2.37)

III. LAPORAN OPERASIONAL
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN : (005) MAHKAMAH AGUNG
NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0\
PENDAPATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Penghasilan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Cukai	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Lainnya	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Masuk	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Keluar	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	10,884,700.	8,736,400.	2,148,300.	24.59
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	10,884,700.	8,736,400.	2,148,300.	24.59
PENDAPATAN HIBAH	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0.

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2024 (Audited)**

Jumlah Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan	10,884,700.	8,736,400.	2,148,300.	24,59
BEBAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Beban Pegawai	3,061,221,234.	2,872,108,643.	189,112,681.	6.584
Beban Persediaan	31,827,000.	36,789,200.	(4,962,200)	3.488)
Beban Barang dan Jasa	602,820,441.	636,448,700.	(33,628,259.)	5.284)
Beban Pemeliharaan	500,607,445.	485,361,534.	15,245,911	3.141
Beban Perjalanan Dinas	63,888,850.	65,690,902.	(1,802,052)	2.743)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0.	0.	0.	0.
Beban Bunga	0.	0.	0.	0.
Beban Subsidi	0.	0.	0.	0.
Beban Hibah	0.	0.	0.	0.
Beban Bantuan Sosial	0.	0.	0.	0.
Beban Penyusutan dan Amortisasi	267,654,375.	290,754,498.	(23,100,123)	7.945)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.	0.	0.	0.
Beban Transfer	0.	0.	0.	0.
Beban Lain-Lain	0.	0.	0.	0.
JUMLAH BEBAN	4,528,019,435.	4,387,153,477.	140,865,958	3.211
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,517,134,735)	(4,378,417,077)	138,717,658.	3.168
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	698,073.	0.	698,073.	0.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	698,073.	0.	698,073.	0.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	286.	0.	286.	infinity
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	286.	0.	286.	infinity
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	698,359	0.	698,359	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,516,436,376)	(4,378,417,077)	138,019,299.	3.152
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
Beban Luar Biasa	0.	0.	0.	0.

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2024 (Audited)**

POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,516,436,376)	(4,378,417,077)	138,019,299.	3.152

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN : (005) MAHKAMAH AGUNG
NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,892,379,556.	8,143,338,290.	(250,958,734.)	(3.08)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,516,436,376)	(4,378,417,077)	(138,019,299)	3.15
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0.	0.	0.	0.
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	0.
SELISIH REVALUASI ASET	0.	0.	0.	0.
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0.	0.	0.	0.
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,320,014,098.	4,127,458,343.	192,555,755	4.67
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(196,422,278)	(250,958,734)	54,536,456	(21.73)
EKUITAS AKHIR	7,695,957,278.	7,892,379,556.	(196,422,278)	(2.49)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01 Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen dengan visi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akSEPBilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelsaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (Audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh

Keuangan

Pengadilan Negeri Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai

perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Langka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah rupiah).

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 September 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2023. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset hasil

revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung

ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

Piutang Tak
Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014

tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Triwulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Triwulan selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 30 September 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi

menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp11,583,059

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp11,583,059** atau **178 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp6,522,000** Pendapatan Pengadilan Negeri Sangatta terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN berupa pendapatan sewa rumah negara.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (425131)	6,522,000	11,583,059	178
Pendapatan Lain – lain (425911)	-	0	0
Jumlah	6,522,000	11,583,059	178

Realisasi pendapatan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan 31 Desember 2023.

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2024 (Audited)

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42304)	0	0	0,00
Pendapatan Lain - lain (425911)	0	0	0,00
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (425131)	11,583,059	8,736,400	33
Penerimaan Kembali Persekot / Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Jumlah	11,583,059	8,736,400	33

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara
Rp4,304,117,157

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Sangatta pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp4,304,117,157** atau **99** persen dari anggaran belanja sebesar Rp4,343,017,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Pegawai	3,075,804,000	3,053,125,871	99
Belanja Barang	1,217,213,000	1,201,131,286	99
Belanja Modal	50,000,000	49,860,000	100
Jumlah Belanja Kotor	4,343,017,000	4,304,117,157	99
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	4,343,017,000	4,304,117,157	99

Perbandingan Realisasi Belanja

Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 Desember 2024	ANGGARAN	REALISASI 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,075,804,000	3,053,125,871	2,889,535,000	2,875,430,157	6.17
Belanja Barang	1,217,213,000	1,201,131,286	1,228,710,000	1,224,077,836	(1.87)
Belanja Modal	50,000,000	49,860,000	0	0	100
Jumlah	4,343,017,000	4,304,117,157	4,118,245,000	4,099,507,993	4.99

Belanja Pegawai
Rp3,053,125,871

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3,053,125,871 dan Rp2,875,430,157

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 DES 2024	REALISASI 31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1,024,157,880	982,188,480	4.27
Belanja Pembulatan	17,785	19,981	(10.99)
Belanja Tunj. Suami / Istri	59,141,620	53,170,680	11.22
Belanja Tunj. Anak	17,349,048	15,595,630	11.24
Belanja Tunj. Struktural	24,220,000	18,830,000	28.62
Belanja Tunj. Fungsional	1,388,400,000	1,283,770,000	8.15
Belanja Tunj. Pph PNS	163,819,942	139,181,586	17.70
Belanja Tunj. Beras	50,042,220	49,969,800	0.14
Belanja Uang Makan	179,993,000	188,814,000	(4.67)
Belanja Tunj. Umum	10,985,000	14,290,000	(4.85)

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2024 (Audited)

Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	135,000,000	129,600,000	(23,12)
Belanja Lembur	0	0	0,00
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	3,053,126,495	2,875,430,157	6,17
Pengembalian Belanja Pegawai	624	0	0
Jumlah Belanja Pegawai	3,053,125,871	2,875,430,157	6,17

Belanja Barang
Rp1,201,131,286

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,201,131,286 dan Rp1,224,077,836

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DES 2024	REALISASI 31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	586,653,340	611,710,616	(4,09)
Belanja Barang Persediaan	34,922,000	36,789,200	(5,07)
Belanja Jasa	15,059,651	15,550,584	(3,15)
Belanja Pemeliharaan	500,607,445	485,261,534	3,16
Belanja Barang Non Operasional	0	9,075,000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	63,888,850	65,690,902	(2,74)
Jumlah Belanja Barang Kotor	1,201,131,286	1,224,077,836	(1,87)
Pengembalian Belanja Barang	0	0	
Jumlah Belanja Barang	1,201,131,286	1,224,077,836	(1,87)

Belanja Modal
Rp.49,860,000

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp49,860,000 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 DES 2024	REALISASI 31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49,860,000	0	-
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja Modal	49,860,000	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA 653256629861000	0	0
Uang Tunai	0	0

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2024 (Audited)**

Kuitansi UP	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp. 3,095,000

C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp3,095,000** dan Rp0.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan :

Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	3,095,000	0
Jumlah	3,095,000	0

Tanah
Rp3.279.400.000

C.3. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp3.279.400.00** dan Rp3.279.400.000.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset tetap tanah per 31 Desember 2024.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3.279.400.000
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2024	3.279.400.000
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	3.279.400.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	9.245 m2	Jl. Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, SH No. 01 Sangatta	2.773.500.000

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2024 (Audited)**

2	700 m2	Jl. Soekarno Hatta Komp Perumahan Dewa Ruci Sangatta	505.900.000
Jumlah			3.279.400.000

Peralatan dan Mesin
Rp 3,025,549,419

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp3,025,549,419** dan Rp2.948.209.419

Terdapat mutasi tambah berupa Transfer Masuk dan tidak terdapat mutasi kurang pada aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3,025,549,419
Mutasi Tambah :	0
- Pembelian	49,860,000
- Hibah Masuk	0
- Transfer Masuk	27,480,000
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2024	3.025,549,419
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	3,025,549,419

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp4,873,641,500

C.5. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp4.873.641.500** dan Rp4.873.641.500

Tidak terdapat mutasi tambah berupa belanja modal Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan dan tidak terdapat mutasi kurang pada aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	4.873.641.500
Mutasi Tambah :	0
- Pembelian	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2024	4.873.641.500
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	4.873.641.500

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp27.517.047

C.6. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp27.517.047** dan Rp. 27.517.047

Tidak Terdapat mutasi kurang pada aset tetap lainnya per 31 Desember 2024.

Mutasi transaksi terhadap Aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2024	27.517.047
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2023	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	27.517.047

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(3.498.374,681)

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp(3,498,374,681)** dan **Rp(3,230,720,306)**

Aset Tak Berwujud
Rp4.900.000

C.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp4.900.000** dan **Rp4.900.000**. Aset tak berwujud ini merupakan Antivirus Kaspersky dengan lisensi selama 2 (dua) tahun.

Aset Lain-lain
Rp49.531.000

C.9. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp49.531.000** dan **Rp49.531.000**. Aset lain-lain ini berasal dari BMN yang dihentikan penggunaannya dan saat ini sedang diajukan usulan permohonan penghapusan kepada Pengguna Barang.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp54.431.000

C.10. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp54.431.000** dan **Rp54.431.000**.

Uang Muka dari
KPPN **Rp0**

C.11. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp.0**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN

adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp14,871,007

C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp14,871,007 dan Rp5,668,104 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Formulir memo penyesuaian dapat dilihat pada lampiran.

Hibah yang belum disahkan Rp0

C.13. Hibah yang belum disahkan

Pada pelaporan Tahun 2024 Satker Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II tidak ada saldo hibah yang belum disahkan.

Ekuitas
Rp7,695,957,278

C.14. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7,695,957,278 dan Rp 7,892,379,556 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp10,884,700

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10,884,700 dan Rp8,736,400 Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian	31 DES 2024	31 DES 2023
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	10,884,700	8,736,400
Jumlah	10,884,700	8,736,400

Beban Pegawai
Rp3,061,221,324

D.2. **Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp3,061,221,324** dan Rp2,872,108,643. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI 31 DES 2024	REALISASI 31 DES 2023
Beban Gaji Pokok PNS	1,023,455,880	982,763,780
Beban Pembulatan	17,152	19,973
Beban Tunj. Suami / Istri	59,114,590	53,185,040
Beban Tunj. Anak	17,341,840	15,597,770
Beban Tunj. Struktural	24,220,000	18,810,000
Beban Tunj. Fungsional	1,392,300,000	1,283,770,000
Beban Tunj. Pph PNS	163,750,642	139,229,280
Beban Tunj. Beras	50,042,220	49,969,800
Beban Uang Makan	183,644,000	184,873,000
Beban Tunj. Umum	10,985,000	14,290,000
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	136,350,000	129,600,000
Beban Lembur	0	0

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2024 (Audited)**

Beban Belanja Pegawai	3,061,221,324	2,872,108,643
Pengembalian Belanja Pegawai		
Jumlah Beban Belanja Pegawai	3,061,221,324	2,872,108,643

Beban Persediaan
Rp31,827,000

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp31,827,000 dan Rp 36,789,200 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang
dan Jasa Rp
602,820,441

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp602,820,441 dan Rp 636,448,700 Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban
Pemeliharaan
Rp500,607,445

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp500,607,445 dan Rp485,361,534 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal.

Beban Perjalanan
Dinas Rp63,888,850

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp63,888,850 dan Rp65,690,902 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

Per 31 Desember 2023 dan 2024

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Perjalanan Dinas	63,888,850	65,690,902
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
Jumlah	63,888,850	65,690,902

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 267,654,375

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp267,654,375 dan Rp290,754,498. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi karena adanya penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp698,359

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2023 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	698,073	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2024 (Audited)**

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	286	0
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	698,359	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp7,892,379,556

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp7,892,379,556** dan **Rp8,143,338,290**

Defisit LO
(4,516,436,376)

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp(4,516,436,376)** dan **Rp(4,378,417,077)** Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp0**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai

persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Selisih revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Nilai Koreksi (Rp)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-lain Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar Entitas Rp4,320,014,098

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4,320,014,098 dan Rp4,127,458,343.

Ekuitas Akhir

E.5. Ekuitas Akhir

Rp7,695,957,27
8

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7,695,957,278 dan Rp7,892,379,556

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Triwulan lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2. INFORMASI AKRUAL

Terdapat utang kepada pihak ketiga sebesar Rp14,871,007. Utang tersebut adalah belanja Belanja Pegawai (51) yang terdiri dari Tunjangan Fungsional Susulan, Tunjangan Kemahalan Susulan, Sebagian Uang Makan Desember dan Belanja Barang (52) yang terdiri dari Belanja Langganan Pengiriman Pos, Belanja Langganan PDAM, Belanja Sewa Web Hosting dan Belanja Langganan Telepon.

Rincian utang kepada pihak ketiga:

Kode dan Jenis Belanja	31 Desember 2024
51/Belanja Pegawai	13,209,000
52/Belanja Barang	1,662,007
Jumlah	14,871,007

F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sangatta Kelas I adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta 653256629861000 a.n. BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0

F.4. REVISI DIPA

Hingga tanggal 31 Desember 2024, Pengadilan Negeri Sangatta

melakukan Revisi DIPA sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:

1. Revisi 1 pada tanggal 03 April 2024
2. Revisi 2 pada tanggal 14 Oktober 2024
3. Revisi 3 pada tanggal 23 Oktober 2024
4. Revisi 4 pada tanggal 4 November 2024
5. Revisi 5 pada tanggal 30 November 2024

F.5. RALAT SPM, SP2D, SSBP, SSPB DAN RETUR SP2D

Hingga tanggal 31 Desember 2024, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II melakukan Koreksi SPM sebanyak 1 kali dan retur SP2D 2 kali. Koreksi SPM dikarenakan kesalahan akun potongan. Sedangkan retur SP2D disebabkan karena kesalahan Nomor Rekening. Baik Koreksi SPM dan retur SP2D telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi SPM

Uraian Deskripsi	
Semula	0
Potongan Akun 425999 sebesar 286	Potongan Akun 425911 sebesar 286

Retur SP2d

NO	Kode Satker/Nama Satker	Tanggal SP2D/Tanggal Retur/ Tanggal Interface/No SP2D/ No Transaksi	Alasan Retur	Tanggal SP2D/No SP2D/ Waktu Penyelesaian Retur	Status Retur
1	662986/ Pengadilan Negeri Sangatta	13-05-2024	Nomor rekening salah/tidak ditemukan	17-05-2024/ 240461401000 015000001/3 hari	Sudah Proses
2	662986/ Pengadilan Negeri Sangatta	01-06-2024	Nomor rekening salah/tidak ditemukan	05-06-2024/ 240461406000 005000001/2 hari	Sudah Proses

F.6. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2024, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Arini Widiastuti, S.I.P.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Arini Widiastuti, S.I.P.
Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM	: Muhamad Rodansa, S.I.P.
Bendahara Pengeluaran	: Yunita Padma Dewi, A.Md., A.B.
Bendahara Penerima	: Aisyah, S.H., M.H.

F.7. PENGUNGKAPAN CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

Penyusunan belanja Pemerintah Pusat yang dirinci menurut fungsi dilakukan untuk melakukan analisis, yaitu mengetahui fungsi-fungsi mana yang menyerap alokasi anggaran paling banyak maupun sedikit. Berikut Capaian Rincian Output pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2024:

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2024 (Audited)

Kementerian/Lembaga	: Mahkamah Agung RI (005)
Unit Organisasi	: Badan Urusan Administrasi (01)
Satuan Kerja	: (Pengadilan Negeri Sangatta (662986)
Fungsi	: Keterlibatan dan Keamanan (03)
Sub Fungsi	: Peradilan (03.04)
Program	: Program Dukungan Manajemen (005.01.WA)
Hasil Program	: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Peradilan Umum (005.01.WA)
Lokasi	: Kalimantan Timur (16)

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1049	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama								
	1. Layanan Perkantoran	4,293,017,000	4,254,257,781	99,1%	1	1	Layanan	99,1%	
	Subtotal	4,293,017,000	4,254,257,781	99,1%	1	1	Layanan	99,1%	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/DII)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Nihil	
	Total Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	4,293,017,000	4,254,257,781	99,1%	1	1	Layanan	99,1%	
	1. Layanan Sarana Internal	50,000,000	49,860,000	99,72%	1	1	Unit	99,72%	
	Subtotal	50,000,000	50,000,000	99,72%	1	1	Unit	99,72%	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/DII)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	
	Total	50,000,000	49,860,000	99,72%	1	1	Unit	99,72%	

G. LAMPIRAN – LAMPIRAN



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 662986
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,343,017,000	4,343,017,000	0
2	Belanja	4,304,117,781	4,304,117,781	0
3	Pengembalian Belanja	-624	-624	0
4	Estimasi Pendapatan	6,522,000	6,522,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	11,583,059	11,583,059	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 30-JAN-25



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 05/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 11:42 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,304,117,157
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	11,583,059	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	698,073
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,884,700
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	286
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,024,157,880	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,785	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	59,141,620	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17,349,048	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	24,220,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,388,400,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	163,819,942	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	50,042,220	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	179,993,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,985,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	135,000,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	544,630,840	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,998,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	33,024,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34,922,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,779,251	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	4,580,400	0
3.0	522141	Belanja Sewa	8,700,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	222,828,450	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	117,956,580	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	159,822,415	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63,888,850	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49,860,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	624
JUMLAH			4,315,700,840	4,315,700,840

Keterangan :

FINAL

Kab. Kutai Timur, 5 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ARINI WIDIASTUTI

197409182006042001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 11:42 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,095,000	0
0.0	131111	Tanah	3,279,400,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,025,549,419	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,873,641,500	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	27,517,047	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,601,055,264
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	889,319,417
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	8,000,000
0.0	162151	Software	4,900,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	49,531,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	49,531,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,900,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	13,209,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,662,007
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,304,117,157
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	11,583,059	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	27,480,000
0.0	391111	Ekuitas	0	7,892,379,556
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	698,073
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,884,700
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	286
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,023,455,880	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	17,152	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	59,114,590	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	17,341,840	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	24,220,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,392,300,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	163,750,642	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	50,042,220	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	183,644,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,985,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	136,350,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	544,630,840	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,049,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	33,024,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,785,001	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	4,521,600	0
3.0	522141	Beban Sewa	8,810,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 11:42 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	222,828,450	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	117,956,580	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	159,822,415	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	63,888,850	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	156,344,918	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	111,309,457	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	31,827,000	0
JUMLAH			15,803,236,460	15,803,236,460

Keterangan :
FINAL

Kab. Kutai Timur, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



[Signature]
ARINI WIDIASTUTI
NIP 197409182006042001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 11:42 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	3,095,000	0	3,095,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	3,095,000	0	3,095,000	
ASET TETAP				
Tanah	3,279,400,000	3,279,400,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,025,549,419	2,948,209,419	77,340,000	2.62
Gedung dan Bangunan	4,873,641,500	4,873,641,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	27,517,047	27,517,047	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,498,374,681)	(3,230,720,306)	(267,654,375)	8.28
JUMLAH ASET TETAP	7,707,733,285	7,898,047,660	(190,314,375)	(2.41)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,900,000	4,900,000	0	0.00
Aset Lain-lain	49,531,000	49,531,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(54,431,000)	(54,431,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	7,710,828,285	7,898,047,660	(187,219,375)	(2.37)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	14,871,007	5,668,104	9,202,903	162.36
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14,871,007	5,668,104	9,202,903	162.36
JUMLAH KEWAJIBAN	14,871,007	5,668,104	9,202,903	162.36
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,695,957,278	7,892,379,556	(196,422,278)	(2.49)
JUMLAH EKUITAS	7,695,957,278	7,892,379,556	(196,422,278)	(2.49)
JUMLAH EKUITAS	7,695,957,278	7,892,379,556	(196,422,278)	(2.49)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,710,828,285	7,898,047,660	(187,219,375)	(2.37)

Keterangan :
FINAL

Kab. Kutai Timur, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran


ARINI WIDIASTUTI
NIP.197409182006042001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662986

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 11:42 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,522,000	11,583,059	5,061,059	177.6	6,797,000	8,736,400	1,939,400	128.53
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,522,000	11,583,059	5,061,059	177.6	6,797,000	8,736,400	1,939,400	128.53
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	6,522,000	11,583,059	5,061,059	177.6	6,797,000	8,736,400	1,939,400	128.53
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,343,017,000	4,304,117,157	(38,899,843)	99.10	4,118,245,000	4,099,507,993	(18,737,007)	99.55
1. Belanja Pegawai	3,075,804,000	3,053,125,871	(22,678,129)	99.26	2,889,535,000	2,875,430,157	(14,104,843)	99.51
2. Belanja Barang	1,217,213,000	1,201,131,286	(16,081,714)	98.68	1,228,710,000	1,224,077,836	(4,632,164)	99.62
3. Belanja Modal	50,000,000	49,860,000	(140,000)	99.72	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662986

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 11:42 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc



URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,343,017,000	4,304,117,157	(38,899,843)	99.10	4,118,245,000	4,099,507,993	(18,737,007)	99.55
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Kab. Kutai Timur, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ARINI WIDIASTUTI
NIP 197409182006042001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 05/05/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 11:41 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,892,379,556	8,143,338,290	(250,958,734)	(3.08)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,516,436,376)	(4,378,417,077)	(138,019,299)	3.15
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,320,014,098	4,127,458,343	192,555,755	4.67
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(196,422,278)	(250,958,734)	54,536,456	(21.73)
EKUITAS AKHIR	7,695,957,278	7,892,379,556	(196,422,278)	(2.49)

Keterangan :

FINAL

Kab. Kutai Timur, 5 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ARINI WIDIASTUTI

NIP 197409182006042001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 11:41 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	10,884,700	8,736,400	2,148,300	24.59
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	10,884,700	8,736,400	2,148,300	24.59
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	10,884,700	8,736,400	2,148,300	24.59
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,061,221,324	2,872,108,643	189,112,681	6.584
Beban Persediaan	31,827,000	36,789,200	(4,962,200)	(13.488)
Beban Barang dan Jasa	602,820,441	636,448,700	(33,628,259)	(5.284)
Beban Pemeliharaan	500,607,445	485,361,534	15,245,911	3.141
Beban Perjalanan Dinas	63,888,850	65,690,902	(1,802,052)	(2.743)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662986) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 05/05/25 8:49 AM
Tgl Cetak : 05/05/25 11:41 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	267,654,375	290,754,498	(23,100,123)	(7.945)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,528,019,435	4,387,153,477	140,865,958	3.211
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,517,134,735)	(4,378,417,077)	(138,717,658)	3.168
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	698,073	0	698,073	
Pendapatan Pelepasan Aset	698,073	0	698,073	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	286	0	286	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	286	0	286	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	698,359	0	698,359	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,516,436,376)	(4,378,417,077)	(138,019,299)	3.152
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,516,436,376)	(4,378,417,077)	(138,019,299)	3.152

Keterangan :

FINAL

Kab. Kutai Timur, 5 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ARINI WIDIASTUTI

NIP 197409182006042001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 005

UAKPB : 662986

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 03/03/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 05/05/25 12:30 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG				SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
URAIAN		SATUAN	BERTAMBAH		BERKURANG		BERTAMBAH		BERKURANG		
KODE			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
131111	Tanah		9,945	3,279,400,000	0	0	0	0	9,945	3,279,400,000	
20101	TANAH PERSIL	-	9,945	3,279,400,000	0	0	0	0	9,945	3,279,400,000	
132111	Peralatan dan Mesin		634	2,971,870,569	17	77,340,000	0	0	651	3,049,210,569	
30103	ALAT BANTU	-	2	9,500,000	0	0	0	0	2	9,500,000	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	9	621,065,670	0	0	0	0	9	621,065,670	
30501	ALAT KANTOR	-	90	155,321,500	0	0	0	0	90	155,321,500	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	404	632,076,579	11	49,860,000	0	0	415	681,936,579	
30601	ALAT STUDIO	-	10	72,997,820	0	0	0	0	10	72,997,820	
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	12	10,051,000	0	0	0	0	12	10,051,000	
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	2	253,278,000	0	0	0	0	2	253,278,000	
31001	KOMPUTER UNIT	-	60	928,170,410	0	0	0	0	60	928,170,410	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	45	289,409,590	6	27,480,000	0	0	51	316,889,590	
133111	Gedung dan Bangunan		12	4,873,641,500	0	0	0	0	12	4,873,641,500	
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	4	3,667,816,500	0	0	0	0	4	3,667,816,500	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	8	1,205,825,000	0	0	0	0	8	1,205,825,000	
135121	Aset Tetap Lainnya		598	27,517,047	0	0	0	0	598	27,517,047	
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	597	19,517,047	0	0	0	0	597	19,517,047	
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	1	8,000,000	0	0	0	0	1	8,000,000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		33	52,381,000	0	0	0	0	33	52,381,000	
30103	ALAT BANTU	-	1	350,000	0	0	0	0	1	350,000	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	3	17,100,000	0	0	0	0	3	17,100,000	
30501	ALAT KANTOR	-	7	11,498,000	0	0	0	0	7	11,498,000	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	16	9,358,000	0	0	0	0	16	9,358,000	
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	1,200,000	0	0	0	0	1	1,200,000	
31001	KOMPUTER UNIT	-	3	11,143,000	0	0	0	0	3	11,143,000	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	2	1,732,000	0	0	0	0	2	1,732,000	
TOTAL				11,204,810,116		77,340,000		0		11,282,150,116	

Kab. Kutai Timur, 5 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



ARINI WIDIASTUTI, S.IP
197409182006042001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
Satuan Kerja : (662986) Pengadilan Negeri Sangatta
No. Dokumen : Kartu Belanja Pegawai yang masih harus dibayar
Tanggal : 31 - 12 - 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Akrual Beban Belanja Uang Makan PNS Tahun 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian Khusus / Jurnal Manual :

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
002	D	511129	Beban Belanja Uang Makan PNS	820,000.00	
	K	212111	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar		820,000.00

Dibuat Oleh : Kasubbag Umum
dan Keuangan

Muhamad Rodansa, S.I.P.
Tanggal : 31-12-2024

Disetujui Oleh : Sekretaris

Arini Widiastuti, S.I.P.
Tanggal : 31-12-2024

Direkam Oleh : Operator Modul GLP

Surta Yani Aritonang, SE.
Tanggal : 31-12-2024

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
Satuan Kerja : (662986) Pengadilan Negeri Sangatta
No. Dokumen : Kartu Belanja Barang yang masih harus dibayar
Tanggal : 31 - 12 - 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Akrual Beban Belanja Langganan Telepon Tahun 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian Khusus / Jurnal Manual :

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
004	D	522112	Beban Belanja Langganan Telepon	107,650.00	
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		107,650.00

Dibuat Oleh : Kasubbag Umum
dan Keuangan

Muhamad Rodansa, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Disetujui Oleh : Sekretaris

Arini Widiastuti, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Direkam Oleh : Operator Modul GLP

Surta Yani Aritonang, S.E.

Tanggal : 31-12-2024

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
Satuan Kerja : (662986) Pengadilan Negeri Sangatta
No. Dokumen : Kartu Belanja Barang yang masih harus dibayar
Tanggal : 31 - 12 - 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Akrual Beban Belanja Langganan Telepon Tahun 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian Khusus / Jurnal Manual :

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
004	D	522112	Beban Belanja Langganan Telepon	107,650.00	
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		107,650.00

Dibuat Oleh : Kasubbag Umum
dan Keuangan

Muhamad Rodansa, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Disetujui Oleh : Sekretaris

Arini Widiastuti, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Direkam Oleh : Operator Modul GLP

Surta Yani Aritonang, S.E.

Tanggal : 31-12-2024

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1600) Kalimantan Timur/ Kalimantan Utara
Satuan Kerja : (662986) Pengadilan Negeri Sangatta
No. Dokumen : Kartu Belanja Barang yang masih harus dibayar
Tanggal : 31 - 12 - 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Akrual Beban Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Tahun 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian Khusus / Jurnal Manual :

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
001	D	521114	Beban Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pus	1,050,500.00	
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		1,050,500.00

Dibuat Oleh : Kasubbag Umum
dan Keuangan

Tanggal : 31-12-2024
Muhamad Rodansa, S.I.P.

Disetujui Oleh : Sekretaris

Tanggal : 31-12-2024
Arini Widiastuti, S.I.P.

Direkam Oleh : Operator Modul GLP

Tanggal : 31-12-2024
Surta Yani Aritonang, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
Satuan Kerja : (662986) Pengadilan Negeri Sangatta
No. Dokumen : Kartu Belanja Barang yang masih harus dibayar
Tanggal : 31 - 12 - 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Akrua! Beban Belanja Langganan Air Tahun 2024

Katagori Jurnal Penyesuaian Khusus / Jurnal Manual :

No	D/K	Kode Akur	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
005	D	522113	Beban Belanja Langganan Air	362,000.00	
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		362,000.00

Dibuat Oleh : Kasubbag Umum
dan Keuangan

Muhamad Rodansa, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Disetujui Oleh : Sekretaris

Arini Widiastuti, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Direkam Oleh : Operator Modul GLP

Surta Yani Aritonagn, S.E.

Tanggal : 31-12-2024

FORMULIR MEMO PENYESUATAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
Satuan Kerja : (662986) Pengadilan Negeri Sangatta
No. Dokumen : Kartu Belanja Pegawai yang masih harus dibayar
Tanggal : 31 - 12 - 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Akruai Beban Belanja Uang Makan PNS Tahun 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian Khusus / Jurnal Manual :

No	D/K	Kode Akur	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
002	D	511129	Beban Belanja Uang Makan PNS	7,139,000.00	
	K	212111	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar		7,139,000.00

Dibuat Oleh : Kasubbag Umum
dan Keuangan

Muhamad Rodansa, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Disetujui Oleh : Sekretaris

Arini Widiastuti, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Direkam Oleh : Operator Modul GLP

Surta Yani Arintonang, SE.

Tanggal : 31-12-2024

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
Satuan Kerja : (662986) Pengadilan Negeri Sangatta
No. Dokumen : Kartu Belanja Pegawai yang masih harus dibayar
Tanggal : 31 - 12 - 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal AkruaI Beban BelanjaTunjangan Fungsional PNS

Kategori Jurnal Penyesuaian Khusus / Jurnal Manual :

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
002	D	511124	Beban Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3,900,000.00	
	K	212111	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar		3,900,000.00

Dibuat Oleh : Kasubbag Umum
dan Keuangan

Muhamad Rodansa, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Disetujui Oleh : Sekretaris

Arini Widiastuti, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Direkam Oleh : Operator Modul GLP

Surta Yani Aritonang, SE.

Tanggal : 31-12-2024

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
Satuan Kerja : (662986) Pengadilan Negeri Sangatta
No. Dokumen : Kartu Belanja Pegawai yang masih harus dibayar
Tanggal : 31 - 12 - 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Akruai Beban Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim

Kategori Jurnal Penyesuaian Khusus / Jurnal Manual :

No	D/K	Kode Akur	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
002	D	511157	Beban Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1,350,000.00	
	K	212111	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar		1,350,000.00

Dibuat Oleh : Kasubbag Umum
dan Keuangan

Muhamad Rodansa, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Disetujui Oleh : Sekretaris

Arini Widiastuti, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Direkam Oleh : Operator Modul GLP

Surta Yani Aritonang, SE.

Tanggal : 31-12-2024

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung RI
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1600) Kalimantan Timur
Satuan Kerja : (662986) Pengadilan Negeri Sangatta
No. Dokumen : Kartu Belanja Barang yang masih harus dibayar
Tanggal : 31 - 12 - 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Akrual Beban Belanja Sewa Web Hosting Tahun 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian Khusus / Jurnal Manual :

No	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
002	D	522141	Beban Belanja Sewa Web Hosting Tahun 20	110,000.00	
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		110,000.00

Dibuat Oleh : Kasubbag Umum
dan Keuangan

Muhamad Rodansa, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Disetujui Oleh : Sekretaris

Arini Widiastuti, S.I.P.

Tanggal : 31-12-2024

Direkam Oleh : Operator Modul GLP

Surta Yani Aritonang, SE.

Tanggal : 31-12-2024

LAPORAN REALISASI KINERJA
Tahun Anggaran 2024

Periode s.d bulan
Kementerian Negara/Lembaga
Eselon 1
Wilayah/Provinsi
Satuan Kerja

: 2024-14
: 005 - MAHKAMAH AGUNG
: 005.01 - BADAN URUSAN ADMINISTRASI
: 16.02 - KAB. PASERKALIMANTAN TIMUR
: 662986 - PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Halaman
Tanggal Cetak

: 1
: 05-05-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	4,343,017,000.00	4,304,117,781.00	99.1%							
04	PERADILAN	4,343,017,000.00	4,304,117,781.00	99.1%							
WA	Program Dukungan Manajemen	4,343,017,000.00	4,304,117,781.00	99.1%							
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	50,000,000.00	49,860,000.00	99.72%							
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50,000,000.00	49,860,000.00	99.72%							
951	Layanan Sarana Internal	50,000,000.00	49,860,000.00	99.72%	1.0000	Unit	1.0000	100%	0.28%		
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	4,293,017,000.00	4,254,257,781.00	99.1%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,293,017,000.00	4,254,257,781.00	99.1%							
994	Layanan Perkantoran	4,293,017,000.00	4,254,257,781.00	99.1%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0.9%		



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN

Nomor : 343/SEK.PN.W18-U6/PL1.1.1/XII/2024

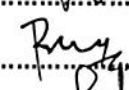
Nama Satker : Pengadilan Negeri Sangatta
Kode Satker : 662986
UAPPB-W : Mahkamah Agung
UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi

Pada hari ini, **Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Pengadilan Negeri Sangatta, Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Panitia Opname Fisik Persediaan :

1. Nama : **Muhamad Rodansa, S.I.P.**
NIP. : 19920808201903 1 006
Jabatan : Ketua
2. Nama : **Revando Lumban Raja, S.Komp.**
NIP. : 19910829202012 1 003
Jabatan : Anggota
3. Nama : **Yunita Padma Dewi, A.Md,A.B.**
NIP. : 19940607202012 2 005
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik barang persediaan Semester II Tahun 2024 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam hasil Opname Fisik. Demikian Berita Acara Opname fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (opname fisik) :

1. Muhamad Rodansa, S.I.P. 
2. Revando Lumban Raja, S.Komp. 
3. Yunita Padma Dewi, A.Md,A.B, 



Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Sangatta


ARINI WIDIASTUTI, S.I.P.
NIP. 197409182006042001

LAPORAN INVENTARISASI BARANG PERSEDIAAN
(STOCK OPNAME)

Nama Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Sangatta
 Kode Satuan Kerja : 662986
 UAPPBW : Kalimantan Timur
 UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	KODE BARANG		NAMA BARANG	KUANTITAS BARANG			KONDISI BARANG			KETERANGAN
	Kode Sub Sub Kelompok Barang	Kode Barang		Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik	Selisih	B	R	U	
1	1010302001	000021	Kertas HVS A4	6	6	-	v	-	-	-
2	1010302001	000022	Kertas F4 Toko Yuri	5	5	-	v	-	-	-

Mengetahui
 Kuasa Pengguna Barang
 Pengadilan Negeri Sangatta



ARINI WIDIASTUTI, S.IP.
 NIP. 197409182006042001

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUN ANGGARAN 2024 (unaudited)

Kode dan Nama UAKPA : (662986) Pengadilan Negeri Sangatta
Kode dan Nama UAPPAW : (1600) Kalimantan Timur
Kode dan Nama Eselon 1 : (01) Badan Urusan Administrasi
Kode dan Nama K/L : (05) Mahkamah Agung

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓
a.	Pagu/DIPA		✓

	b. Estimasi PNPB		✓	Tidak
	c. Belanja		✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	e. Pendapatan		✓	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	g. Kas BLU		✓	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
	i. Kas Hibah		✓	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		✓	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Material dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak

2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah				
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak
Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			✓	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.	N/A	N/A	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	N/A	N/A	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A	N/A	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		N/A	N/A	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal				
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	N/A	N/A	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	N/A	N/A	Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		✓	Ya/Tidak
Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLk				
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		✓	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya

4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	✓		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	✓		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		✓	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx)		✓	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		✓	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	✓		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	✓		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		✓	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		✓	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	N/A	N/A	Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	N/A	N/A	Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		✓	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		✓	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		✓	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		✓	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	✓		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		✓	Ya/Tidak

	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	N/A	N/A	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual AkruaI pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan AkruaI		✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	✓		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan AkruaI		✓	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan AkruaI		✓	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	✓		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan AkruaI	✓		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan AkruaI	✓		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?	N/A	N/A	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	N/A	N/A	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI".

Mengetahui
Rejabat Penyusun LKKL,

Muhammad Rodansa, S.I.P.
NIP. 199208082019031006

Sangatta, 31 Desember 2024
Penelaah,

Surta Yani Aritonang, S.E.
NIP. 198906272022032002





MONITORING RETUR SP2D

NO.	KODE SATKER NAMA SATKER	JENIS SP2D	SP2D RETUR				PEMBERITAHUAN RETUR				SP2D PENGANTI			STATUS RETUR	SUMBER DANA KODE AKUN
			TGL SP2D TGL RETUR TGL INTERFACE NO SP2D NO TRANSAKSI	BANK PEMBAYAR	BANK PENERIMA NAMA PENERIMA NO. REKENING PENERIMA JUMLAH	URAIAN SP2D	ALASAN RETUR	NO SURAT	TGL SURAT	UPLOAD/UBAH SURAT	JATUH TEMPO PENYELESAIAN RETUR	TGL PROSES	TGL SP2D NO SP2D WAKTU PENYELESAIAN RETUR		
1	662986 PENGADILAN NEGERI SANGATTA	NON GAJI	13-05-2024 13-05-2024 14-05-2024 240461301007792 240461301007792000001	BRI	BANK RAKYAT INDONESIA NORAIN BUMBUNGAN 42801028070531 Rp.2.251.800	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Susulan Bulan Mei 2024 Untuk 1 Pegawai 1 Jiwa	Nomor Rekening Salah/Tidak Ditemukan	S-839/KPN.2001/2024	14-05-2024	N/A	21-06-2024	17-05-2024 24046140100000150000001 3 hari	BANK RAKYAT INDONESIA NORAIN BUMBUNGAN 342801028070531 Rp. 2.251.800	SUDAH PROSES	RM 51
2	662986 PENGADILAN NEGERI SANGATTA	GAJI	01-06-2024 01-06-2024 03-06-2024 240461504001634 240461504001634000020	BRI	BANK RAKYAT INDONESIA NORAIN BUMBUNGAN 42801028070531 Rp.2.251.800	Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Induk Bulan Juni 2024 Untuk 20 Pegawai 45 Jiwa	Account Credit Not Found	S-927/KPN.2001/2024	03-06-2024	N/A	19-07-2024	05-06-2024 24046140600000050000001 2 hari	BANK RAKYAT INDONESIA NORAIN BUMBUNGAN 342801028070531 Rp. 2.251.800	SUDAH PROSES	RM 51

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



MAHKAMAH AGUNG (005)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN NEGERI SANGATTA (662986)
Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxx304)
Virtual Account : 653256629861000 | BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA 01 BRI Cabang S
Periode : 01-12-2024 s/d 31-12-2024

INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-03	12:38:51	36171687	From 032901003295305 to 653256629861000 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 240461301026554000001	0,00	0,00	34.827.260,00	34.827.260,00	SPAN	
2024-12-03	13:41:21	36176895	penarikan tunai	34.827.260,00	34.827.260,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2024-12-05	09:40:15	36290164	From 032901003295305 to 653256629861000 Belanja Barang Berupa Honorarium Pengelola Keuangan Bulan November 2024 Untuk 6 Pegawai Sesuai SK No24046130102666000001	0,00	0,00	2.637.500,00	2.637.500,00	SPAN	
2024-12-05	09:53:28	36294153	From 032901003295305 to 653256629861000 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 240461301026879000001	2.637.500,00	0,00	34.872.820,00	37.510.320,00	SPAN	
2024-12-05	11:15:58	36303422	penarikan an yunita	37.510.320,00	37.510.320,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2024-12-06	09:44:28	36355234	From 032901003295305 to 653256629861000 Penggantian Uang persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 240461301027286000001	0,00	0,00	30.401.000,00	30.401.000,00	SPAN	
2024-12-06	11:26:39	36369463	penarikan an yunita	30.401.000,00	30.401.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2024-12-09	09:19:52	36432529	From 032901003295305 to 653256629861000 Belanja Barang Berupa Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Desember 2024 Untuk 6 Pegawai Sesuai SK No240461301027357000001	0,00	0,00	2.637.500,00	2.637.500,00	SPAN	
2024-12-09	09:26:17	36433797	From 032901003295305 to 653256629861000 Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 240461301027398000001	2.637.500,00	0,00	29.015.000,00	31.652.500,00	SPAN	
2024-12-11	13:13:40	36547910	penarikan tunai-yunita	31.652.500,00	31.652.500,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2024-12-13	16:09:23	36648877	From 653256629861000 to 653256629861000 SETORAN_65325_6629861000	0,00	0,00	6.670.000,00	6.670.000,00	BRIVA	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-16	09:43:21	36681631	penarikan tunai- yunita	6.670.000,00	6.670.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
Total Mutasi				141.061.080,00	141.061.080,00				
Saldo Akhir							0,00		